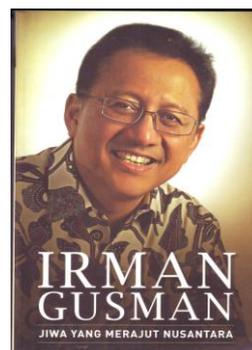


Resensi Buku:

MENJADI PEMIMPIN DI NEGERI YANG KELUH KESAH

Judul Buku	: <i>IRMAN GUSMAN: Jiwa yang Merajut Nusantara</i>
Penulis	: Irman Gusman
Editor	: Hasril Chaniago
Penerbit	: Ghalia Indonesia Publising, Jakarta
Cetakan I	: Tahun 2012
Tebal	: 515, termasuk biodata singkat editor
Penulis Resensi	: Mestika Zed



BUKU ini merupakan otobiografi seorang tokoh muda, *the rising star*, yang meniti karier di antara gerigi-gerigi tajam yang penuh resiko, ketika negeri ini sedang dilanda keluh kesah melintas zaman penuh ketidakpastian. Irman Gusman (lahir 1962), tokoh yang dibicarakan dalam buku ini, saat ini adalah Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah), sebuah lembaga tinggi negara yang baru dibentuk sejak era Reformasi. Karena DPD adalah wadah menyalurkan aspirasi masyarakat daerah lewat jalur non-partai, maka pertarungan kepemimpinan dalam lembaga ini lebih mengandalkan kualitas dan reputasi pribadi. Irman Gusman, dalam hal ini, berhasil menaiki anak tangga tertinggi yang prestisius, tetapi tidak mudah. Buku ini, dengan judul yang menggugah, *Irman Gusman: Jiwa yang Merajut Nusantara* (2012), menceritakan 'kisah sukses' yang diraihinya, sehingga dalam sebuah diskusi buku, ia pernah *digadang-gadang* menjadi kandidat pemimpin bangsa di masa

datang. Kita tunggu saja, kisah yang belum selesai ini.

Buku ini dirajut dalam 14 bab, dengan dua non-bab (Propolog dan Epilog). Prolog: "Negeri Mukjizat", Bab 1: "Tanah Kelahiran", Bab 2: "Kenangan di Kota Padang", Bab 2: "Merantau", Bab 4: "Panggilan Kampung Halaman", Bab 5: "Keluarga", Bab 6: "Reformasi", Bab 7: "Tiga Pekan yang Dramatis", Bab 8: "MPR Reformasi 1999-2004", Bab 9: "Babak Baru Demokrasi Indonesia", Bab 10: "Twilite Orchestra di Ruang Paripurna", Bab 11: "Pelangi Nusantara", Bab 12: "RI 7", Bab 13: "Konvensi Baru dan Amandemen Konstitusi", Bab 14: "Merajut Nusantara", Epilog: "Tantangan Masa Depan Kita".

Dilihat dari judul-judul babnya, buku ini agaknya lebih tepat disebut *memoar* dan bukan otobiografi. *Pertama*, karena isinya lebih merupakan kenangan yang diingat dalam memori pribadinya mengenai salah satu fragmen kehidupan seorang tokoh, dalam

hal ini, perjalanan kariernya. *Kedua*, karena *memoar*, sesuai dengan sifatnya, sangat subjektif, sebab yang diceritakan di dalamnya adalah pengalaman pribadi. Tiap pengalaman *per definisi* selalu subyektif. Lain halnya kalau otobiografi. Otobiografi pada dasarnya adalah salah satu jenis *genre* dari penulisan sejarah. Sebagai tulisan sejarah, ia merekam seluruh fragmen hidupnya secara menyeluruh dan seimbang. Penulis otobiografi dituntut membeberkan interaksi pribadi dengan lingkungan dan zamannya secara terinci serta memerlukan *cross-check* datanya mirip dengan penulisan sejarah.

Bagaimanapun juga dilihat dari judul buku ini, *Irman Gusman. Jiwa yang Merajut Nusantara* (2012), terselip pesan dan cita-cita penulisnya yang mendambakan rajutan Nusantara yang solid karena pada saat yang sama ia menyiratkan ada semacam kekhawatiran akan nasib masa depan NKRI. Kita menyebutnya dengan *Republic of Fear*, yaitu Republik kecemasan, cemas akan ambruknya NKRI, sesuatu yang bukan mustahil jika para petinggi negeri ini tidak menginsyafi betapa rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan betapa rawannya kondisi riil negeri ini dari ancaman bahaya laten sapatisme.

Barangkali tidak ada yang keberatan jika “kita kini seperti hidup dalam dua Republik: *Republic of Fear* dan *Republic of Hope*.” Akal sehat kita tentu menghendaki terwujudnya *Republic of Hope*. Bukan sekedar janji-janji Pemilu atau Pilkada, tetapi tindakan nyata yang seksama dan

dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebuah *Republik* yang dicitakan sebagaimana dijanjikan dalam *blue-print* Indonesia Merdeka, yang terdapat dalam dokumen Pembukaan UUD 1945 itu. Di situ dengan tegas dinyatakan, bahwa kita warga negara mau merdeka, berbangsa dan bernegara karena pemerintah NKRI yang dijanjikan itu

- bersedia yang *melindungi* segenap anak-bangsa, dan bukan memperdiarkannya;
- bersedia *menyejahterakan* rakyat (negara kesejahteraan) dan bukan negara yang menelantarkan rakyat dan menyerah ke pasar.
- bersedia mencerdaskan *kehidupan bangsa* dan bukan membodohnya, apalagi membohonginya .
- ikut berperan serta dan *setara* dalam kancah internasional dan bukan menjual kedaulatan dengan didikte dunia global.

Akan tetapi itulah soalnya. Kebanyakan para pemimpin dan/atau penguasa politik negeri ini tampaknya lebih memilih memelihara *Republic of Fear*, Republik Kecemasan yang melahirkan keluh-kesah warganya. *Good governance* dan reformasi dengan segala cirinya hanya ‘slogan’ yang diucapkan di dalam pidato. Selebihnya adalah tukar-tambah kepentingan yang diatur para *broker* atau mafia dalam pelbagai bentuknya. Pemimin kita cukup berpuas diri dengan pujian luar tentang Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Hak Asasi Manusia diujakan ke mancanegara, tetapi kejahatan kemanusiaan di dalam negeri diputihkan untuk modal Pemilu. Jargon Negara hukum dan toleransi dihimbaukan ke

seluruh rakyat, tetapi ketegasan garis batas antara yang hak dan batil menjadi kabur. Ketersediaan ‘stok’ pangan dikatakan cukup, tetapi di pasar harga-harga melambung naik. Kejadian seperti ini terjadi secara ‘teratur’ tiap kali bulan Ramadan atau di kala berita kenaikan gaji pegawai negeri.

Di negeri ini orang tak ragu-ragu melanggar aturan, karena perbuatan melanggar hukum dalam keseharian tidak ada resikonya atau bisa dinego. Politisi di Senayan atau di daerah, lebih suka menyimak hasil *pooling* yang meramalkan politik suksesi 2014, sementara tumpukan pekerjaan di depan hidung masih terbengkalai. Dari waktu ke waktu, khususnya setiap memasuki tahun baru, kita mengulang-ulang atau memperbaharui *Hope*, harapan akan ada perbaikan. Namun pada saat yang sama, di tengah-tengah masyarakat keluhan-kesah, dan kegelisahan mengapung di atas bara sosial. Kita paksakan konversi dari minyak tanah ke gas, atas nama penghematan devisa, sementara di dapur rakyat awam kompor gas meladak menyisakan tragedi karena perlindungan konsumen dari negara tidak berfungsi efektif. Pada titik ini kita melihat Negara *for its own*, untuk dirinya sendiri dan bukan untuk rakyat.

Di layar lokal, di Sumatera Barat misalnya – dan ini tidak masuk agenda yang dibahas DPD di Jakarta – otoritas pelistrikan dikeluhkan rakyat di daerah ini, karena argumen mereka sukar dicernakan akal sehat rakyat awam. Tiap musim kemarau, listrik tiap sebentar pudur. Alasannya karena debit air menyusut, sehingga kurang daya untuk memutar turbin. Namun

ketika musim penghujan datang seperti sekarang, penyakit listrik hidup-mati tetap terjadi. Alasannya lain lagi. Ada kerusakan dalam instalasi atau travo sedang perbaikan. Orang awam cukup sabar dan pasrah dengan kondisi ini. Jikapun mereka mengadu atau mencek ke bagian informasi, yang menjawab di seberang sana adalah mesin otomatis yang mengoper jawaban sekian kali hingga sambungan terakhir jawabannya ‘akan diteruskan’. “Saya hanya penunggu di sini Pak! “, lanjutnya. Itulah ilustrasi dari sebuah instansi teknis bidang pelistrikan. Orang sulit mencari saluran informasi dan jawaban yang benar karena otoritas berkelit, manipulasi informasi alias membohongi publik. Hal serupa juga terjadi dalam pasokan migas (minyak dan gas). Kita mengeluh dan tidak dapat berbuat apa-apa ketika harga migas melonjak di pasaran global. Sebaliknya kita menggerutu ketika harga migas anjlok di bursa internasional. Sungguh sebuah negeri yang suka berkeluh kesah karena para pemimpinnya tidak berbuat banyak untuk rakyat, kecuali sibuk memikirkan target pribadi dan perpanjangan masa jabatan mereka.

Republic of Fear menunggu pemimpin yang peduli, yang mampu memberi rasa aman dan kepercayaan tanpa dibatasi sekat-sekat aliran politik dan segala yang berbau SARA, seperti yang dikeluhkan sekali waktu oleh sosiolog Mokhtar Naim, dalam esei *Kompas* baru-baru ini.

Membaca buku ini sungguh mengasikkan, karena bahasanya yang lancar, mengalir, seperti juga kariernya, meluncur ibarat mata air jernih dari hulunya di pegunungan Bukit Barisan Sumatera Barat. Irman Gusman, putra

Guguak Tabek Saroyo, di dataran tinggi Agam, berasal dari keluarga pedagang emas dengan tradisi merantau. Akan tetapi, “sejak generasi saya, anggota keluarga besar kami sudah berkembang ke berbagai profesi dan lapangan pekerjaan” (hlm. 29). Dihitung dalam tiga generasi di atasnya, Irman mencatat ada 300 orang anggota keluarga besar yang diturunkan dari kakek buyutnya Haji Kamili dan Datuak Batuah. Di antaranya hanya 10% yang tinggal di kampung. Selebihnya merantau di nusantara, dan di luar negeri, terutama Australia dan Amerika Serikat.

Buku ini dimulai dengan potret sebuah ‘Gedung Nusantra’ di komplek Parlemen Senayan, yang megah, setinggi 100 meter berlantai 24. Di situlah ia sehari-hari bekerja memimpin DPD RI yang beranggotakan 128 orang (2004) atau 4 orang tiap propinsi. Pertanyaan yang mersiaukan bagi saya, ialah sejarah masa depan karirnya. Apakah tokoh muda yang mengorbit demikian cepatnya, tidak akan seperti ‘cirit bintang’, yang sebentar muncul dan secepat kilat pula hilang, terbenam di tengah jalan? Saya kira kita tidak ingin berspekulasi dengan sejarah masa depan [karier]-nya yang belum selesai. Menjadi pemimpin di negeri yang berkeluh kesah tidak hanya memerlukan stamina yang kuat dengan urat saraf dari kawat, tetapi juga pemimpin yang mau bertobat agar tidak menyesal sampai hari kiamat. Bertobat dan insyaf bahwa negeri ini dimerdekakan dari penjajahan Belanda. Pembukaan UUD 1945 yang kita sebutkan di atas merupakan *blue-print* Indonesia mer-

deka dan sekaligus anti-tesis dari penjajahan. Paling ada empat watak penjajahan atau kolonialisme yang mesti diwaspadai:

Pertama, kolonialisme itu berwatak *ekspansif*, yang selalu ingin meluaskan kuasa politik dari yang kecil menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Ini sejalan dengan watak kapitalisme, yang dibawanya, yaitu selalu ingin mendapat keuntungan lebih besar daripada apa yang dapat diberikannya pada orang lain.¹

Kedua, kolonialisme itu berwatak *diskriminatif*, anti-demokrasi, dengan menciptakan iklim ketergantungan *abadi* antara penjajah dan rakyat jajahan; semua ditentukan berdasarkan hierarki kekuasaan dari ”atas” dan dengan dukungan sistem feodalisme yang sudah berakar dalam masyarakat.

Ketiga, kolonialisme itu berwatak menindas (*oppressive*) dengan memaksakan semua kehendak penjajah kepada rakyat jajahan atas metode kolonial. Hanya ada tiga metode kolonial yang lazim digunakan: (i) dengan menggunakan kekerasan bersenjata (pasifikasi); (ii) dengan instrumen hukum kolonial (*exorbitant recht*), termasuk kontrak-kontrak, yang berpihak kepada rejim penguasa; (iii) dan dengan melanggengkan feodalisme dan menjinakkan kaum raja-raja, bangsawan/penguasa lokal tradisional.

¹ Ungkapan Minangkabau mengenai watak “ekspansif” ini dilukiskan dalam pepatah “*ibarat Belanda mintak tanah*”: *dari sejengkal ke sehasta; dari sehasta ke sedepa; dari sedepa ke sekepala*, dan seterusnya; “*Lalu penjahit lalu kulindan*” (kalau penjahit tangan dijahitkan, maka benang yang diikat dibelakangnya otomatis lewat pula).

Keempat, kolonialisme itu berwatak menguras (*exploitative*), dengan memeras secara maksimal semua potensi SDM dan SDA negeri jajahan untuk kepentingan penjajah, dan sebagian besar hasilnya diangkut ke negeri penjajah.

Manakala watak seperti itu masih muncul dalam kepemimpinan bangsa hari ini, maka tak ada alasan untuk menolak bahwa *mentaliteit* atau watak kolonialisme pada dasarnya masih belum terkikis habis di negeri ini. Itu artinya *mindset* feodal-kolonialisme, disadari atau tidak, masih tetap hidup di negeri yang katanya sudah lebih setengah abad merdeka. Pemimpin masa datang ialah pemimpin yang peduli dengan sejarah sebagai referensi menemukan

masa depannya, bukan pemimpin suka menghapuskan memori atau ingatan kesadaran sejarah, melupakan bagaimana negeri ini dulu dimerdekakan, seperti yang dijanjikan dalam Pembukaan UUD 1945 itu. Jika ini diabaikan, alamat negeri yang tengah dilanda keluh kesah ini akan tetap hidup dalam ketegangan tarik menarik antara *Republic of Fear* dan *Republic of Hope*.” Sekian. Terima kasih. ***

Mestika Zed
Alumnus Vrije Universiteit,
Amsterdam,
Direktur Pusat Kajian Sosial-Budaya
& Ekonomi (PKSBE)
FIS, Univ. Negeri Padang.

